

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada data bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asumsi masyarakat bahwa pelanggaran pemilu di Kabupaten Bantul pada 2019 cukup tinggi serta banyak asumsi yang menjelaskan bahwa efek dari sistem proposional daftar terbuka berakibat pada maraknya pelanggaran pemilu khususnya efek jual beli suara serta terciptanya pragmatisme politik yang cukup tinggi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini adalah studi lapangan yang meneliti persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka di Kabupaten Bantul. Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat seperti penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bantul dan Bawaslu Bantul serta aktor politik yang meliputi partai-partai di Kabupaten Bantul. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dalam hal teknik analisis data menggunakan aplikasi *Nvivo 12 plus*. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk memahami persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka. 2) untuk mengetahui dampak sistem proposional terbuka bagi penyelenggara pemilu dan aktor politik. 3) untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran pemilu apa yang terjadi dilapangan dengan diterapkan sistem proposional terbuka.

Hasil penelitian ini adalah 1) mayoritas penyelenggara pemilu dan aktor politik menganggap sistem proposional daftar terbuka berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemilu karena disebabkan proses pragmatisme politik yang besar dan mengakibatkan pelanggaran pemilu yang tinggi. 2) sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik mayoritas tidak setuju sistem proposional terbuka dipertahankan dalam pemilu selanjutnya. 3) tindakan yang dilakukan hampir rata-rata mengambil tindakan mengkritik melalui instrumen evaluasi pemilu di internal penyelenggara pemilu dan aktor politik.

Kata Kunci : Persepsi, penyelenggara pemilu, aktor politik, sistem proposional terbuka

ABSTRACT

This reasearch is based on data from the Election Supervisory Body (Bawaslu) of the Special Region of Yogyakarta and public assumptions that election violations in Bantul Regency in 2019 are quite high and many assumptions that explain that the effects of the open list proportional system resulted in the rise of election violations especially the effects of buying and selling votes and the creation of sufficient political pragmatism that quiet high in Bantul Regency. This research is a field study that examines perceptions of election organizers and political actors towards the open proportional system in Bantul Regency. Primary data sources were obtained directly from the parties involved such as the election organizer in this case the Bantul KPU and Bantul Bawaslu as well as political actors including political parties in Bantul Regency. This research methodology uses a qualitative approach and in terms of data analysis techniques using the application of *Nvivo 12 plus*. The purpose of this study is 1) to understand the perceptions of election organizers and political actors towards an open proportional system. 2) to find out the impact of open proportional systems for election organizers and political actors. 3) to find out what election violations occur in the field by applying an open proportional system.

The results of this study are 1) the majority of election organizers and political actors consider the open list proportional system to have a negative impact on the implementation of elections because it is caused by a large process of political pragmatism and resulting in high election violations. 2) the attitude of the election organizers and majority political actors do not agree with the open proportional system being defended in the next election. 3) the actions taken almost on average take criticism through the election evaluation instrument in the internal election organizer and political actors.

Key words: Perception, election organizers, political actors, open proportional systems